

Hak-hak buruh dan liberalisasi perdagangan

Keliat, Makmur, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90351&lokasi=lokal>

Abstrak

Sesungguhnya pengertian tentang hak-hak buruh pada tingkat internasional masih beragam. Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dipandang sebagai lembaga yang melindungi dan mempromosikan hak-hak buruh telah mengeluarkan ratusan konvensi. Namun masih belum terdapat kesepakatan tentang konvensi apa saja yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari keragaman ini, terdapat beberapa hak-hak buruh yang dikeluarkan melalui konvensi ILO yang sangat paralel dengan dan sukar dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Beberapa hak tersebut misalnya antara lain adalah hak kebebasan berserikat (tahun 1948), hak pengupahan yang adil bagi wanita dan pria (1951), penghapusan tenaga kerja paksa (1957), dan diskriminasi dalam imbalan pekerjaan dan jabatan (1958).¹ Dalam derajat tertentu kepedulian masyarakat internasional terhadap hak-hak buruh mendahului kepedulian terhadap HAM. Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh mendahului pembentukan PBB menunjukkan hal ini. Terlepas dari faktanya, namun sangat jelas bahwa hanya setelah PD II terdapat perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap hak-hak buruh. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia oleh Majelis Umum PBB yang dibuat pada tahun 1948 tampaknya memberikan dorongan bagi ILO untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan tentang hak buruh.-

Tulisan berikut tidak bertujuan untuk menyoroti hubungan antara HAM dengan Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adalah kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menghonTati hak-hak buruh dalam konteks liberalisasi perdagangan di negara berkembang. Seperti diketahui setelah terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, komitmen negara-negara anggota untuk terus bergerak ke arah tindakan-tindakan liberalisasi perdagangan terus dilakukan.² Walau tidak secara langsung berhubungan dengan liberalisasi perdagangan, terdapat berbagai isu baru yang muncul yang akan menentukan masa depan sistem perdagangan dunia. Satu diantara berbagai isu baru tersebut terkait dengan hak-hak buruh dan perdagangan internasional

Dumping Sosial atau Imperialisme Sosial